BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan, baik untuk pihak internal perusahaan seperti manajemen dan karyawan, maupun pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditur dan pemerintah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomik (IAI, 2011). Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan (Subramanyam, 1996). Laba merupakan informasi yang menjadi unsur utama dalam laporan keuangan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Consepts (SFAC)* Nomor 8. Laba menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya, karena memiliki nilai prediktif (FASB, 2010). Pemegang saham dan investor memiliki pandangan bahwa laba merupakan peningkatan nilai ekonomis yang dimasa akan datang akan diterima melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja manajemen dan memperkirakan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) dan dapat bersifat

oportunis (manajemen melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya) (Scott, 2014). Apabila pengelolaan laba bersifat oportunis, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor.

Kualitas laba telah menjadi perhatian yang cukup besar dalam bidang keuangan dan perbankan ketika dunia usaha pada tahun 2001 mencatat skandal keuangan di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Skandal tersebut menunjukkan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh manajemen meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 1997-1998. Terjadinya berbagai kasus penyajian laporan keuangan yang tidak semestinya ini menunjukkan kegagalan laporan keuangan di dalam memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya mengenai kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan menjadi diragukan kualitasnya.

Krisis baru-baru ini menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan tata kelola di industri perbankan, Cornett *et al*. (2009) menunjukkan kebijakan manajemen bank dalam merekayasa pendapatan selama periode keuntungan rendah di Amerika Serikat dengan menunda pelaporan kerugian pinjaman dan meningkatkan realisasi keuntungan sekuritas dll, meskipun ada pemantauan dan pengawasan oleh regulator. Karena perilaku oportunistik manajerial mengubah persepsi investor terhadap kualitas laba

yang dilaporkan, Lev (1989) berpendapat bahwa manipulasi pelaporan keuangan harus menjadi bagian mendasar dari penelitian kualitas laba, yang telah menyebabkan banyaknya penelitian empiris yang menyelidiki kualitas laba. Penyebab terjadinya skandal-skandal keuangan ini adalah kurangnya penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui suatu proses pengawasan atau monitoring yang menjamin bahwa akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan sehingga tercapai pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. (FCGI, 2003).

Penelitian yang mengaitkan mekanisme *corporate governance* dan kualitas laba diluar Indonesia diantaranya dilakukan oleh Warfield *et al*. (1995), hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajerial secara positif berhubungan dengan kualitas informasi laba dansebaliknya berhubungan negatif dengan besarnya *accounting accrual adjustments*. PenelitianVafeas (2000) menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih kecil dipahami lebih informatifoleh pelaku pasar, sebaliknya tidak terdapat bukti bahwa ukuran dewan mengurangi kualitasinformasi laba. Anderson *et al*. (2003) membuktikan bahwa komite audit independen meningkatkan ERC perusahaan. Tidak seperti kebanyakan penelitian *corporate governance* di Indonesia lainnya yang

sampelnya adalah perusahaan manufaktur, penelitian ini mengambil sampel perusahaan perbankan. Hal itu didasari oleh pentingnya fungsi dan peran strategis sektor perbankan dalam perekonomian. Tumbuhnya sektor perbankan dengan sangat pesat tanpa memperhatikan kekuatan dan kesehatan sektor perbankan, menyebabkan *corporate governance* di level mikro berorientasi pada perbankan yang cacat (Syakhroza, 2002). Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, memberikan pelayanan dalam lalu lintas sistem pembayaran, sekaligus sebagai sarana pelaksanaan kebijakan moneter. Keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun sebagai suatu sistem, merupakan suatu prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat, prasyarat bagi kebijakan moneter yang efektif. Tidak sehatnya sektor perbankan dapat mengakibatkan rusaknya perekonomian suatu negara, terlebih mengingat hampir seluruh proses perputaran uang terjadi melalui perbankan (Suseno dan Abdullah, 2004). Oleh karenanya, kondisi bank yang sehat yang didukung melalui penerapan *Good Corporate Governance* mutlak diperlukan.

Industri perbankan memiliki peraturan yang lebih ketat dibandingkan industri lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank oleh Bank Indonesia. Peraturan perbankan dan pengawasan diprioritaskan pada stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu manajer mempunyai insentif untuk melakukan perekayasaan laba supaya perusahaan dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Prediktabilitas laba sama pentingnya bagi bank seperti perusahaan lain, karena bank sangat bergantung pada arus kas masa depan. Namun, kualitas laba menjadi dipertanyakan ketika manajer berlaku oportunis dan

memiliki insentif untuk mengelola laba yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999; Dechow dan Skinner, 2000; Rosenfield, 2000).Tanpa kualitas informasi akuntansi, bank tidak dapat memperkirakan prospek masa depan mereka dan menarik investor. Mengingat bahwa laporan keuangan biasanya memberikan informasi yang berguna di bawah rezim IFRS, laba berkualitas tinggi harus menjadi prediktor yang lebih baik dari laba masa depan untuk bank. Sekali lagi, mekanisme tata kelola perusahaan berperan untuk mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan kinerja bank. Karena laba operasi adalah penyumbang utama kinerja, hal tersebut membuktikan bahwa mekanisme governance dilengkapi untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan memastikan pendapatan berkelanjutan di bank. Tata kelola yang efektif memberikan sinyal positif ke pasar mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup dari waktu ke waktu, tata kelola seperti mengarah ke pengungkapan kualitas dan laba, pelaporan keuangan untuk melindungi kepentingan investor dan menahan manipulasi manajerial. Peran penting tata kelola dalam memprediksi laba masa depan dan langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperbaiki kinerja bank. Kinerja yang baik suatu bank diharapkan mampu meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri atau sistem perbankan secara keseluruhan. Pada sisi lain kinerja bank dapat pula dijadikan sebagai tolok ukur kesehatan bank tersebut. Secara intuitif dapat dikatakan bahwa bank yang sehat akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat serta mampu menghasilkan laba yang optimal.

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso dan Triandaru, 2006). Menurut Kasmir (2012:41) "Tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.". Hasil akhir penilaian kesehatan bank dapat digunakan bank sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Di samping itu perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam juga akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank (PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011). Pengalaman dari banyaknya kasus-kasus dalam industri perbankan mendorong perlunya regulasi baru dalam perbankan. Inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan permasalahan mendasar pada bank.

Profitabilitas perbankan dinilai berada dalam tekanan selama periode 2014 sampai 2015 dan diperkirakan berlanjut pada 2016. Salah satu akibatnya, kinerja perbankan di kuartal I 2015 melambat dibanding periode sebelumnya. Berdasarkan laporan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada awal Mei 2015, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) menurun dalam dua bulan periode.

Tren pertumbuhan laba perbankan juga masih menurun. Kendati demikian, rasio permodalan masih dalam rentang aman pada kisaran 20,6 persen walaupun potensi kenaikan kredit bermasalah (NPL) masih membayangi di awal 2015. Potensi kredit bermasalah terutama berasal dari turunan sektor pertambangan dan komoditas yang harganya masih melemah. Likuiditas perbankan pada Februari 2014 juga masih belum memperlihatkan peningkatan, yang ditandai dengan stabilnya rasio kredit terhadap simpanan atau LDR. LDR sedikit menurun dari 95,9 persen pada Januari 2015 menjadi 95,8 persen pada Februari 2015. Stabilnya LDR ini disebabkan oleh perlambatan lebih lanjut pada pertumbuhan kredit, sementara DPK tumbuh 100 bps lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit sudah mengalami peningkatan, yaitu dari 11,3 persen (yoy) pada Januari 2015 menjadi 11,9 persen (yoy) pada bulan Februari 2015. Akan tetapi, jika dilihat dengan rata-rata bergerak, sebenarnya pertumbuhan kredit masih berada dalam tren menurun. Pertumbuhan kredit sampai akhir 2015 diperkirakan berada di kisaran 14,2 persen atau di bawah target OJK dan BI yang sebesar 15-17 persen. Sebab, dengan kondisi ekonomi saat ini, bank akan lebih realistis. Sedangkan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan berada di level 12,5 persen. Jika suku bunga masih tinggi, pertumbuhan DPK bisa ke arah 13-14 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih berada di level 5,3 persen. Namun, masih harus menunggu adanya pergerakan BI dan pemerintah dalam upaya mengimprovisasi perekonomian.Meningkatnya biaya dana (*cost of fund*) menjadi penyebab utama penurunan pendapatan bunga bersih, ditambah dengan adanya peningkatan kredit bermasalah yang ikut mendorong peningkatan biaya pencadangan CKPN. Sementara,

fee based income belum sepenuhnya bisa menutupi biaya operasional sehingga laba bersih menjadi tertekan. (www.republika.co.id)

Pemutusan hubungan karyawan atau PHK umumnya terjadi di bank-bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor asing. Upaya pengurangan bahkan sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Merujuk laporan keuangan Bank Maybank Indonesia kuartal I 2016, sepanjang 2015 lalu, Maybank telah memangkas 289 karyawannya. Pengurangan karyawan 2015 lalu ini tak sebanyak tahun 2014 yang mencapai 459 pegawai. PT Bank CIMB Niaga Tbk juga sudah menggunting jumlah pegawai hingga 1.426 orang di tahun 2015 lalu. Sedangkan di tiga bulan pertama tahun 2016 ini, CIMB mengurangi 143 karyawan. Bank lain yang juga melakukan PHK adalah Bank Danamon. Sesuai laporan keuangan, tahun lalu, bank milik Temasek ini mengurangi hingga 6.871 karyawan. Di kuartal I 2016 ini tercatat 1.510 pegawai Danamon berkurang. (www.pemeriksaanpajak.com)

Bank perlu meningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance* yang bertujuan agar bank dapat mengidentifikasi permasalahan lebih dini dan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis (Surat Edaran BankIndonesia No. 15/ 15/ DPNP/ 2013). Semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik (*good governance*) serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 /POJK.03/2016).

Bank yang mendapatkan predikat sehat wajib untuk tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang mendapatkan predikat tidak sehat wajib untuk segera memperbaiki tingkat kesehatannya. Untuk bank yang termasuk dalam bank tidak sehat, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau pemegang saham pengendali wajib menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia (PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011). Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menilai kesehatan bank dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No.13/ 1/ PBI/ 2011 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan RGEC *(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)*. Dasar hukum penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 pada tanggal 5 Januari 2011 yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 10/ PBI/ 2004. Petunjuk teknis pelaksanaannya mengacu ke Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24/ DPNP pada tanggal 25 Oktober 2011. Bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*/ RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor profil risiko *(risk profile), good corporate governance* (GCG), rentabilitas *(earnings)*, dan permodalan *(capital)* untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.Sistem penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR ini juga sering disebut sistem yg berbasis risiko, RBBR *(Risk Based Bank Rating).* Dalam konsep RBBR ini bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank agar dapat lebih mengakomodir keunikan dari masing-masing bank yang ada dengan menerapkan prinsip kehati-hatian

dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank Indonesia menyebutkan bahwa implementasi RBBR lebih pada aspek analisis dan *judgement* dimana dari sisi Bank Indonesia berupaya mengembangkan suatu sistem penilaian peringkat atau rating yang lebih.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kusumaningrostati *et al.* (2014), Khafid (2015), Farooque (2015) dan Mollah *et al.*(2015)dengan menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap prediktabilitas laba di industri perbankan Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji peran mekanisme *corporate governance* meliputi komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit terhadap prediktabilitas laba dan menambahkan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan indikator profil risiko, earning dan permodalan sebagai variabel mediasi dan gender sebagai variabel moderator. Penambahan gender dalam penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa gender yang dalam hal ini diproksikan dengan proporsi perempuan dalam dewan merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (PBI No. 13 / 1/ PBI/ 2011).

Mollah *et al*. (2015) menemukan bahwa struktur dewan dan kekuasaan CEO memiliki pengaruh yang signifikan pada pendapatan prediktabilitas bank-bank besardan proporsi direksi perempuan menggambarkan bahwa mereka mampu menurunkan risiko bank, dan memprediksi laba masa depan. Proporsi perempuan

dalam dewan perusahaan memperlemah pengaruh *return on assets* dan *net interest margin* terhadap *income smoothing* (Kusumaningrostati *et al.* 2014). Cornett *et al*. (2009) mempelajari hubungan antara manajemen laba dengan tata kelola perusahaan menggunakan bank-bank AS holding besar. Mereka menggunakan data pada 100 perusahaan holding bank terbesar (BHCs) di Amerika Serikat selama periode 1994-2002 dan menemukan bahwa laba, dewan independen, dan modal yang berhubungan negatif dengan manajemen laba. Di sisi lain, Kanagaretnam *et al*. (2014) mempelajari dampak dari faktor-faktor kelembagaan internasional tentang kualitas laba. Menggunakan sampel besar bank non-AS dari 35 negara untuk periode 1993-2006, mereka melaporkan bahwa arus kas prediktabilitas adalah salah satu dari lima ukuran kualitas laba, yang lebih tinggi di negara-negara dengan hukum, struktur kelembagaan ekstra-hukum dan politik yang lebih kuat.

Penelitian pertama yang memberikan bukti empiris mengenai keragaman dalam dewan perusahaan berhubungan dengan nilai keuangan yang meningkat dilakukan oleh Carter *et al*. (2003). Penelitiannya menunjukkan bahwa keragaman didefinisikan sebagai prosentase perempuan, Afro-Amerika, Asia, dan Hispanik dalam dewan perusahaan, terdapat hubungan positif yang signifikan antara fraksi perempuan atau minoritas dalam dewan perusahaan dengan nilai perusahaan. Jamilah *et al*. (2007) menyatakan bahwa perempuan diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat terjadi kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. Beberapa penelitian terbaru yang dilakukan oleh IFC (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak perempuan sebagai anggota direksi

memiliki kinerja yang lebih baik. Menurut Miaoui dalam IFC (2013), terdapat beberapa penelitian dalam bidang bisnis dan ekonomi yang menunjukkan hubungan erat antara kinerja perusahaan dengan semakin banyaknya perempuan yang menjadi anggota direksi.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk penelitian yang ada dalam beberapa cara. Studi pertama pada hubungan antara mekanisme tata kelola (*corporate governance*) terhadap prediktabilitas laba, meskipun penelitian yang ada meneliti baik manajemen laba atau penghasilan informativeness atau persistensi sebagai proxy untuk kualitas laba, beberapa penelitian menggunakan arus kas masa depan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional (Velury dan Jenkins, 2006), manajemen laba (Cornett *et al*., 2009), keragaman jenis kelamin (Ye *et al*., 2010), karakteristik dewan (Mashayekhi dan Bazaz, 2010). Penelitian ini berfokus pada prediktabilitas laba sebagai ukuran kualitas laba yang didasarkan pada kemampuan laba untuk memprediksi laba itu sendiri dan hubungannya dengan mekanisme tata kelola yang dimotivasi oleh kerangka konseptual IFRS, yang menunjukkan bahwa pengguna dan investor harus mendapatkan informasi dari laporan keuangan untuk menilai arus kas masa depan.Kedua, sejalan dengan Pathan (2009), Pathan dan Faff (2013), Mollah dan Zaman (2015), variabel tata kelola yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi tingkat risiko di bank. Karena laba berhubungan positif dengan kinerja dan negatif dengan pengambilan risiko, dapat dikatakan bahwa variabel tata kelola juga memiliki sebuah bearing pada pendapatan saat ini dan laba masa depan. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indikator

profil risiko earning dan permodalan dalam *Risk-based Banking Rating* terhadap prediktabilitas laba serta mengafirmasi kembali peran dan pengaruh keberadaan perempuan dalam jajaran anggota dewan perusahaan, yaitu proporsi perempuan pada gabungan anggota direksi dan dewan komisaris terutama terhadap prediktabilitas laba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka judul yang diambil pada penelitian ini, yaitu "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Prediktabilitas Laba pada Industri Perbankan di Indonesia dengan Tingkat Kesehatan Bank sebagai Variabel Mediasi dan Gender sebagai Variabel Moderating".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan yang berdampak pada kemampuan untuk memprediksi laba di masa yang akan datang.
2. Salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh predikat sehat dan dapat memprediksi laba masa depan dengan baik.

3. Afirmasi peran dan pengaruh keberadaan perempuan dalam jajaran anggota dewan perusahaan, yaitu gabungan anggota direksi dan dewan komisaris terutama terhadap prediktabilitas laba

1.3. Pembatasan Masalah

Karena begitu luasnya cakupan bidang yang dibicarakan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya pada Bank Umum yang bersifat konvensional dan sudah *Go Public*.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum yang bersifat konvensional dan sudah *Go Public* dan terdaftar di lembaga IICG *(Indonesian Institute for Corporate Governance)* selama periode 2011-2015
3. Indikator tingkat kesehatan bank yang dinilai hanya faktor kuantitatif saja. Alat analisis yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah RBBR, aspek yang dinilai adalah faktor *Risk Profile, Earning* dan *Capital*. *Risk Profile* dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hal tersebut dikarenakan pada risiko diatas peneliti dapat memperoleh data kuantitatif yang tidak dapat diperoleh pada faktor risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Faktor *Earning* dengan menggunakan 2 indikator

yaitu *Net Interest Margin* (NIM) dan *Return On Aset* (ROA) dan *Capital* dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

4. Mekanisme *corporate governance* diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit.
5. Gender merupakan proporsi perempuan dalam dewan perusahaan yaitu gabungan anggota direksi dan dewan komisaris.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, penelitian ini ingin menyelidiki secara komprehensif pengaruh *corporate governance* terhadap prediktabilitas laba dengan tingkat kesehatan bank sebagai variabel mediasi dan gender sebagai variabel moderating. Permasalahan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan dan parsial mempengaruhi prediktabilitas laba?
2. Apakah proporsi perempuan dalam dewan perusahaan memoderasi pengaruh komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap prediktabilitas laba?
3. Apakah tingkat kesehatan bank yang memediasi hubungan antara komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional dan komite audit dan prediktabilitas laba berbeda tergantung dari proporsi perempuan dalam dewan perusahaan?

1.5.Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan dan parsial terhadap prediktabilitas laba.
2. Untuk mengetahui proporsi perempuan dalam dewan perusahaan memoderasi pengaruh komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap prediktabilitas laba.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yang memediasi hubungan antara komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit dan prediktabilitas laba berbeda tergantung dari proporsi perempuan dalam dewan perusahaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Regulator

   Bagi pihak regulator, yaitu BI, OJK, BAPEPAM dan BEI, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris akan efektifitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai mekanisme *corporate governance* agar lebih ditingkatkan penerapannya pada bank umum sehingga lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga memperoleh predikat sehat.

2. Bagi Praktisi Keuangan

   Bagi praktisi keuangan, dalam hal ini manajemen, investor, dan auditor pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui peningkatan pengawasan tentang mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh terhadap prediktabilitas laba. Dengan demikian, para akuntan maupun auditor dapat melaporkan laba dengan kualitas yang lebih baik dan para investor dapat menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusannya secara lebih bijaksana.

3. Bagi Akademisi

   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran dan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap prediktabilitas laba pada perusahaan perbankan di Indonesia.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengembangan ilmu manajemen keuangan mengenai analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* pada perusahaan perbankan.